

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian Otonomi pendidikan yang luas kepada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan dan system yang ada di sekolah.

Otonomi diberikan agar sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan masyarakat setempat. Bentuk otonomi dalam bidang pendidikan berbeda dengan otonomi bidang lainnya, Otonomi dibidang pendidikan tidak terhenti pada daerah tingkat kabupaten dan kota, tetapi justru langsung kepada sekolah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pembangunan strategi sesuai dengan kondisi setempat, maka sekolah dapat memberdayakan guru agar lebih berkonsentrasi pada tugas utamanya yaitu mengajar. Selain itu sekolah sebagai lembaga pendidikan di beri kewenangan dan kekuasaan yang luas untuk mengembangkan program-program kurikulum dan pengelolaan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik serta tuntutan masyarakat.

Sekolah juga harus mampu mencermati kebutuhan peserta didik yang bervariasi, keinginan staf yang berbeda, kondisi lingkungan yang beragam, harapan masyarakat menitipkan anaknya pada sekolah agar kelak bisa menjadi mandiri, serta tuntutan dunia kerja untuk memperoleh tenaga yang produktif, potensial, dan berkualitas.

Sekolah pada semua jenjang dan jenis pendidikan dan pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota dapat menangkap momentum otonomi sekolah dengan melakukan reformasi diri untuk mewujudkan otonomi sekolah tersebut. Dengan sifat otonominya sekolah di harapkan bukan lagi institusi mekanik, birokratis dan institusi yang kaku, tetapi dengan sifat otonomi tersebut, sekolah menjadi sebuah institusi yang demokratis, kreatif, dan inovatif untuk melakukan pembaharuan diri (*self Reform*).

Dengan demikian otonomi sekolah dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta perundang-undangan yang berlaku. (Kemendiknas, 2007:12).

Otonomi sekolah juga berperan dalam menampung konsensus umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan sedapat mungkin keputusan seharusnya dibuat oleh mereka yang berada di garis depan (*line staf*), yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan, dan yang terkena akibat-akibat dari kebijakan tersebut, yaitu guru dan kepala sekolah.

Keterlibatan kepala sekolah dan guru dalam pengambilan keputusan di sekolah juga mendorong rasa kepemilikan yang lebih tinggi terhadap sekolahnya, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk menggunakan sumber daya yang ada seefisien mungkin untuk mencapai hasil optimal.

Menurut Sagala (2011:163), Mengemukakan bahwa otonomi sekolah merupakan tindakan desentralisasi yang dilakukan oleh lembaga tinggi (pemerintah) sampai ketingkat sekolah (guru kelas) yang menuntut kesiapan pengelola berbagai level untuk melakukan peran sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya. Jadi secara konseptual otonomi sekolah adalah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah agar sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola secara mandiri kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku guna untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan, terutama dalam pengambilan keputusan di sekolah .

Adanya otonomi sekolah, seluruh komponen yang terkait dengan sekolah punya kewajiban untuk saling mendukung demi optimalisasi peran sekolah dalam mendampingi anak bangsa menuju pada tingkat kedewasaan secara mental fisik dan intelektual. Guru, karyawan, orang tua siswa, alumni dan masyarakat yang peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan di sebuah sekolah.

Melalui otonomi yang luas sekolah dapat meningkatkan kependidikan dengan menawarkan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan keputusan yang diambil. Sebagaimana

diketahui cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin menunjukkan bagaimana gaya kepemimpinannya.

Dalam pelaksanaan otonomi sekolah secara efektif dan efisien menuntut seorang kepala sekolah, memiliki pandangan luas tentang sekolah dan pendidikan. Kepala sekolah dituntut untuk melakukan fungsinya sebagai manajer sekolah yang melakukan pengambilan keputusan dalam meningkatkan proses belajar mengajar dengan melakukan supervisi kelas, membina dan memberikan saran-saran positif pada guru. Dengan demikian pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang turut menentukan proses dan tingkat keberhasilan kepemimpinan itu sendiri. Pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi maju mundurnya organisasi atau lembaga. Pengambilan keputusan yang tepatlah yang akan menghasilkan suatu perubahan terhadap sekolah kearah yang lebih baik, tapi sebaliknya pengambilan keputusan yang salah akan berdampak pada sekolah.

Pengambilan keputusan khususnya di sekolah merupakan hal yang sangat substansial dan harus dilakukan. Kondisi ini mengingat bahwa sekolah merupakan intuisi yang harus di perhadapkan dengan berbagai persoalan yang memerlukan pemecahan masalah. Usaha untuk mencari solusi yang tepat atas berbagai masalah yang muncul tersebut harus melalui proses pengambilan keputusan yang tepat, dimana proses pengambilan keputusan di sekolah dapat dilakukan sejak awal sampai dengan lahirnya keputusan. Hal ini perlu dilakukan agar keputusan yang di hasilkan berkualitas dan dapat diketahui dengan pasti alur pengambilan keputusan.

Menurut Sutopo (2010:249-250) dalam proses pengambilan keputusan, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu: 1) Mengakui atau menentukan masalah atau isu. 2) Menganalisis kesulitan dan klasifikasi problem. 3) Menetapkan kriteria pemecahan masalah. 4) Mengembangkan rencana. 5) Menyusun rencana tindakan program, mengkomunikasikan, memonitor dan mengevaluasi.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa pengambilan keputusan di sekolah, langkah-langkahnya sebagai berikut: 1) Identifikasi masalah. 2) Menganalisis situasi dan kondisi. 3) Pengajuan dan pengembangan alternatif. 4) Analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. 5) Evaluasi keputusan yang telah dihasilkan.

Untuk lebih mematangkan otonomi sekolah dalam pengambilan keputusan maka perlu adanya hubungan yang harmonis antara guru dan personil lainnya, terutama kepala sekolah selaku penanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Untuk itu kepala sekolah perlu menjalin hubungan yang baik dengan guru-guru, karena hal itu sangat menentukan tingkat partisipasi otonomi sekolah dalam proses pengambilan keputusan.

Hubungan yang baik dapat diwujudkan dalam bentuk keterbukaan atau transparansi kepala sekolah terhadap segala potensi dan rencana strategis yang akan di ambil dalam penentuan kebijakan pendidikan di sekolah. Demikian juga guru perlu memiliki keterbukaan terhadap ide gagasan, sehingga keduanya dapat di pertemukan untuk mendapat alternatif yang sesuai. Melalui hubungan yang harmonis antara kepala sekolah dan guru di harapkan dapat membantu proses otonomi sekolah dalam pengambilan keputusan yang tepat di sekolah.

Dengan demikian pendidikan yang ada di sekolah dapat memberikan tuntunan kepada warga sekolah yang diberikan oleh orang yang paling bertanggung jawab yaitu kepala sekolah. Dimana kepala sekolah merupakan seorang manajer di sekolah, ia harus bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan program pengajaran di sekolah. Karena kepala sekolah sebagai tokoh sentral di sekolah mempunyai peraturan yang akan di terapkan melalui proses pengambilan keputusan yang tepat.

Sebagaimana di ketahui pengambilan keputusan yang belum begitu optimal terjadi karena ketidak selarasan antara komponen input, proses dan output yang menyebabkan suatu permasalahan tersendiri, baik bagi guru maupun siswa. Permasalahan tersebut muncul ketika tujuan (output) dari otonomi sekolah dalam pengambilan keputusan di sekolah yang diharapkan belum begitu optimal.

Berangkat dari uraian tersebut, dengan melalui hubungan yang baik antara kepala sekolah dengan guru-guru di harapkan dapat membantu proses otonomi sekolah dalam pengambilan keputusan yang tepat di sekolah, sehingga rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dapat diatasi sesuai yang di harapkan.

Berdasarkan hasil observasi awal di SMP Negeri Se-Kecamatan Batudaa Pantai, masalah yang ditemukan tentang otonomi sekolah dalam pengambilan keputusan yaitu : Kewenangan sekolah dalam pengambilan keputusan belum optimal, adanya kesimpang siuran dari guru-guru terhadap wewenang yang di ambil oleh kepala sekolah, dan keterlibatan guru-guru dalam otonomi sekolah terutama dalam pengambilan keputusan belum maksimal.

Berdasarkan temuan diatas maka peneliti tertarik mengkaji dan melakukan penelitian mendalam tentang “ Otonomi Sekolah dalam Pengambilan Keputusan di SMP Negeri Se-Kecamatan Batudaa Pantai,Kabupaten Gorontalo.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana otonomi sekolah mengidentifikasi masalah dalam pengambilan keputusan di SMP Negeri Se-Kecamatan Batudaa Pantai?
2. Bagaimana otonomi sekolah menganalisis situasi dan kondisi dalam pengambilan keputusan di SMP Negeri Se-Kecamatan Batudaa Pantai?
3. Bagaimana otonomi sekolah dalam pengembangan alternatif pengambilan keputusan di SMP Negeri Se- Kecamatan Batudaa Pantai?
4. Bagaimana otonomi sekolah menganalisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal dalam pengambilan keputusan di SMP Negeri Se-Kecamatan Batudaa Pantai?
5. Bagaimana otonomi sekolah mengevaluasi keputusan yang telah dihasilkan di SMP Negeri Se-Kecamatan Batudaa Pantai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk Mengetahui otonomi sekolah dalam mengidentifikasi masalah pengambilan keputusan di SMP Negeri se-Kecamatan Batudaa Pantai.
2. Untuk mengetahui otonomi sekolah dalam menganalisis situasi dan kondisi dalam pengambilan keputusandi SMP Negeri se-Kecamatan Batudaa Pantai.

3. Untuk mengetahui otonomi sekolah dalam pengembangan alternatif pengambilan keputusan di SMP Negeri di SMP Negeri se-Kecamatan Batudaa Pantai.
4. Untuk mengetahui otonomi sekolah dalam menganalisis Lingkungan Internal (ALI) dan (ALE) dalam Pengambilan Keputusan pada di SMP Negeri se-Kecamatan Batudaa Pantai.
5. Untuk mengetahui otonomi sekolah dalam mengevaluasi keputusan yang telah dihasilkan di SMP Negeri se-Kecamatan Batudaa pantai.

D.Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak sebagai informasi dan acuan bagi sekolah yang bersangkutan.

1. Manfaat bagi kepala sekolah adalah kepala sekolah lebih meningkatkan kompetensinya dalam otonomi sekolah terutama dalam pengambilan keputusan.
2. Manfaat bagi guru adalah dapat meningkatkan kompetensi yang dimilikinya dalam mengatasi persoalan pengambilan keputusan.
3. Manfaat bagi peneliti adalah peneliti dapat mengimplementasikan teori-teori yang telah didapatkan, sehingga peneliti bias membandingkan antara teori dan penerapannya dilapangan.